



Optimalisasi Peran Operasi Keamanan Laut dalam Menegakkan Kedaulatan Negara di Laut Perbatasan Indonesia

Indra Putra Wira^{*1}, Mochamad Achnaf², Prasetyo Agus Hariadi³

^{1,2,3}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: indraputra56raptor@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-01 Keywords: <i>Maritime Security Operations; State Sovereignty; Border Seas; Indonesia Navy; Maritime Security.</i>	As an archipelagic nation, Indonesia possesses vast and strategic maritime territories, thus facing various challenges in safeguarding its sovereignty and maritime security, particularly in border areas. In this context, the Maritime Security Operations conducted by the Indonesian Navy serve as the state's primary instrument for enforcing the law, securing territorial waters, and demonstrating state presence at sea. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews with Indonesian Navy personnel directly involved in the execution of Opskamla, as well as a literature review of various documents, regulations, and maritime defense literature. The analysis was conducted qualitatively to obtain a comprehensive overview of the effectiveness and challenges in the implementation of Opskamla. The findings indicate that Opskamla plays a crucial role in maintaining state sovereignty in border seas through patrol, surveillance, and law enforcement activities. However, its implementation still faces obstacles in the form of limited defense equipment (alutsista), the vastness of the surveillance area, and a lack of coordination among maritime elements. Therefore, enhanced synergy, equipment modernization, and strategic policy support are necessary for Opskamla to operate more optimally and sustainably in safeguarding Indonesia's maritime sovereignty.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-01 Kata kunci: <i>Operasi Keamanan Laut; Kedaulatan Negara; Laut Perbatasan; TNI Angkatan Laut; Keamanan Maritim.</i>	Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang sangat luas dan strategis, sehingga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim, khususnya di kawasan perbatasan. Dalam konteks tersebut, Operasi Keamanan Laut (Opskamla) oleh TNI Angkatan Laut menjadi instrumen utama negara untuk menegakkan hukum, mengamankan wilayah perairan, serta menunjukkan kehadiran negara di laut (<i>state presence at sea</i>). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap personel TNI Angkatan Laut yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Opskamla, serta studi pustaka terhadap berbagai dokumen, peraturan, dan literatur pertahanan maritim. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan tantangan pelaksanaan Opskamla. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opskamla berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara di laut perbatasan melalui kegiatan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan alutsista, luasnya wilayah pengawasan, dan kurangnya koordinasi antarunsur maritim. Diperlukan peningkatan sinergi, modernisasi peralatan, dan dukungan kebijakan strategis agar Opskamla dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua Asia dan Australia serta di antara dua samudra besar Hindia dan Pasifik menjadikan Indonesia memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap berbagai dinamika regional dan global (Andi Arsana, 2016). Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia ((CIA), 2025), Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan beragam karakteristik oseanografisnya. Kondisi ini memberikan

keuntungan geostrategis yang besar, seperti potensi ekonomi maritim, jalur perdagangan internasional, serta posisi penting dalam stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik. Namun, di sisi lain, luasnya wilayah laut juga menghadirkan tantangan besar dalam menjaga kedaulatan negara, terutama terhadap pelanggaran batas wilayah, eksploitasi sumber daya alam ilegal, dan ancaman nontradisional di laut (Sukma, 2001). Oleh karena itu, kedaulatan maritim Indonesia tidak hanya bergantung pada aspek hukum internasional, tetapi juga pada

kemampuan negara dalam mengawasi, Mengendalikan, dan mempertahankan setiap jengkal wilayah lautnya melalui kehadiran nyata kekuatan pertahanan laut yang efektif dan berkelanjutan.

Kedaulatan negara merupakan hak tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dan menegakkan hukum di seluruh wilayah yurisdiksinya, termasuk wilayah darat, laut, dan udara. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, kedaulatan di laut memiliki makna strategis karena mencakup penguasaan atas sumber daya alam, jalur komunikasi laut, serta keamanan perairan nasional. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial sejauh 12 mil laut dan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut untuk pemanfaatan sumber daya alam (Damos Dumoli Agusman, 2013).

Opskamla merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan mempertahankan kedaulatan NKRI di wilayah laut yurisdiksi nasional (Indonesia, 2004). Opskamla dilaksanakan secara berkesinambungan melalui kegiatan patroli, pengawasan, serta penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum di laut, termasuk penyelundupan, pencurian ikan, perompakan, pelanggaran wilayah, dan kejahatan lintas negara lainnya. Operasi ini juga berfungsi sebagai sarana *state presence at sea*, yaitu kehadiran nyata negara di laut yang menunjukkan eksistensi dan kewibawaan pemerintah dalam mengelola serta melindungi wilayah maritimnya. Dalam pelaksanaannya, Opskamla tidak hanya menuntut kesiapan unsur kapal perang dan satuan operasi, tetapi juga kemampuan koordinasi dan sinergi antarinstansi maritim seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Polairud (Busro, 2019). Melalui pelaksanaan Opskamla yang terencana, terukur, dan terintegrasi, Indonesia berupaya menjaga stabilitas keamanan maritim, menegakkan hukum laut nasional dan internasional, serta memperkuat kedaulatan negara di seluruh wilayah perairannya.

Dalam pelaksanaannya, Opskamla menjadi instrumen utama TNI Angkatan Laut dalam menegakkan kedaulatan tersebut. Melalui kegiatan patroli, pengawasan, penegakan hukum, serta pencegahan pelanggaran wilayah, Opskamla berfungsi sebagai wujud kehadiran negara di laut. Dengan demikian, keberhasilan

Opskamla tidak hanya menentukan tingkat keamanan perairan nasional, tetapi juga menjadi indikator nyata tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah laut (Agastia, 2020). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara komprehensif peran dan optimalisasi Opskamla dalam menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah laut, terutama di kawasan perbatasan yang memiliki nilai strategis sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk ancaman.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai peran dan optimalisasi Opskamla dalam menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah laut (Sugiyono, 2017). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, kebijakan, serta implementasi kegiatan Opskamla yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para perwira dan personel TNI Angkatan Laut yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Opskamla (Yin, 2011). Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pelaksanaan tugas, hambatan di lapangan, strategi operasional, serta upaya optimalisasi peran Opskamla dalam menjaga kedaulatan negara di laut perbatasan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai dokumen dan literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan operasi keamanan laut, serta doktrin dan kebijakan pertahanan maritim. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pemahaman yang objektif dan komprehensif mengenai pelaksanaan Opskamla oleh TNI Angkatan Laut (Miles, Huberman and Saldaña, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh melalui studi

pustaka dan wawancara dengan sejumlah personel TNI Angkatan Laut serta instansi maritim terkait, ditemukan bahwa Opskamla memiliki peran yang sangat strategis dalam menegakkan kedaulatan negara di wilayah laut perbatasan Indonesia. Pelaksanaan Opskamla secara umum telah berjalan efektif dalam menunjukkan kehadiran negara di laut, terutama melalui kegiatan patroli rutin, operasi gabungan, dan pengawasan wilayah laut yurisdiksi nasional. Kegiatan tersebut berkontribusi besar dalam menekan berbagai pelanggaran hukum di laut, seperti pencurian ikan oleh kapal asing (illegal fishing), pelanggaran batas wilayah, penyelundupan barang, serta aktivitas kejahatan lintas negara (Darmawan, 2019).

Efektivitas Opskamla masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional, terutama terkait keterbatasan jumlah unsur kapal patroli, jangkauan pengawasan di wilayah perbatasan yang luas, serta kebutuhan peningkatan kemampuan teknologi pemantauan laut berbasis satelit (Dinarto, 2020). Peningkatan profesionalisme personel, modernisasi alutsista, serta penerapan konsep operasi terpadu berbasis teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam optimalisasi peran Opskamla dalam menegakkan kedaulatan negara. Pengembangan kerja sama regional melalui forum keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik juga dipandang penting untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di laut perbatasan (Supriyanto, 2015). Dengan demikian, keberhasilan Opskamla tidak hanya diukur dari jumlah operasi yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana operasi tersebut mampu menciptakan rasa aman, menegakkan hukum, dan memperkuat legitimasi kedaulatan NKRI di laut.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Opskamla merupakan instrumen vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, namun untuk mencapai efektivitas optimal diperlukan peningkatan sinergitas antarinstansi, dukungan anggaran pertahanan yang memadai, serta pemanfaatan teknologi maritim modern yang mampu memberikan keunggulan informasi dalam setiap operasi di laut perbatasan (Bakrie, 2017).

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opskamla memiliki posisi strategis sebagai

salah satu instrumen utama dalam menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah laut, khususnya di daerah perbatasan yang rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum dan ancaman keamanan non-tradisional.

1. Perspektif teori Kedaulatan negara

Dalam konteks teori kedaulatan negara, pemikiran Jean Bodin pada abad ke-16 menegaskan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan absolut yang dimiliki oleh negara untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum di dalam wilayahnya tanpa campur tangan pihak lain (Bodin, 1992). Teori ini kemudian berkembang dalam konsep kedaulatan modern, di mana kedaulatan tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan politik, tetapi juga mencakup aspek hukum, ekonomi, dan keamanan yang menyeluruh terhadap seluruh wilayah yurisdiksi negara, termasuk daratan, laut, dan udara. Dengan demikian, kedaulatan merupakan simbol kemerdekaan dan eksistensi negara dalam sistem internasional.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), makna kedaulatan memiliki dimensi yang lebih luas dan juga kompleks. Berdasarkan pengakuan internasional melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, Indonesia berhak sepenuhnya atas laut teritorial sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan, serta memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) di ZEE sejauh 200 mil laut untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Selain itu, Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, mengawasi pelayaran, dan menjaga keamanan di wilayah tersebut. Pengakuan ini menjadi dasar hukum internasional bagi Indonesia dalam menegaskan kedaulatannya di laut dan memperkuat posisi strategisnya sebagai negara maritim di kawasan Indo-Pasifik.

Namun, pengakuan secara hukum internasional tidak serta merta menjamin tegaknya kedaulatan negara apabila tidak disertai dengan kehadiran nyata dan pengendalian efektif oleh kekuatan negara di lapangan. Di sinilah Opskamla oleh TNI Angkatan Laut memiliki peran sentral sebagai bentuk implementasi praktis dari kedaulatan negara di laut (Courmont,

2017). Opskamla merupakan instrumen yang merepresentasikan fungsi negara sebagai penguasa dan pelindung wilayah laut, dengan melaksanakan kegiatan patroli, pengawasan, penegakan hukum, serta pencegahan terhadap pelanggaran wilayah dan aktivitas ilegal di perairan nasional. Melalui operasi tersebut, negara menunjukkan eksistensinya secara fisik dan hukum di laut, yang sekaligus menjadi bentuk penegasan terhadap prinsip *state presence at sea* (Bueger, 2015).

Pelaksanaan Opskamla juga menjadi wujud nyata bahwa kedaulatan bukan hanya konsep normatif atau deklaratif, tetapi harus diterjemahkan ke dalam tindakan operasional yang berkesinambungan. Kehadiran kapal perang, unsur patroli laut, dan pasukan keamanan maritim merupakan bentuk artikulasi dari kedaulatan itu sendiri, karena tanpa kemampuan menjaga dan menegakkan hukum di laut, maka kedaulatan hanya akan menjadi simbol tanpa kekuatan. Dengan kata lain, pelaksanaan Opskamla adalah perpanjangan tangan dari kekuasaan negara yang berdaulat untuk melindungi kepentingan nasionalnya, menegakkan hukum laut, serta menjamin keamanan dan juga keselamatan aktivitas maritim di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Dengan demikian, hubungan antara teori kedaulatan negara dan pelaksanaan Opskamla bersifat konseptual sekaligus fungsional. Secara konseptual, teori kedaulatan memberikan landasan filosofis dan hukum bagi negara untuk memiliki otoritas penuh atas wilayah lautnya. Secara fungsional, Opskamla menjadi mekanisme operasional untuk memastikan bahwa otoritas tersebut benar-benar dijalankan di lapangan. Kombinasi dari keduanya memperlihatkan bahwa kedaulatan Indonesia di laut bukan sekadar pengakuan internasional, melainkan hasil dari kemampuan negara dalam menghadirkan kekuatan, ketertiban, dan kepastian hukum di wilayah maritimnya.

2. Perspektif teori keamanan maritim

Dari perspektif teori keamanan maritim, kekuatan laut merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan nasional di wilayah perairan suatu negara.

Pemikiran Alfred Thayer Mahan menjelaskan bahwa sea power atau kekuatan laut adalah kunci kejayaan dan kedaulatan bangsa karena laut berfungsi sebagai jalur komunikasi, perdagangan, dan pertahanan strategis (Mahan, 1890). Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, kemampuan menguasai dan mengendalikan wilayah laut (*sea control*) menjadi syarat penting untuk memastikan keamanan nasional.

Dalam konteks tersebut, Opskamla yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut merupakan wujud konkret penerapan teori keamanan maritim. Opskamla berfungsi menciptakan dan mempertahankan sea control di wilayah yurisdiksi nasional melalui kegiatan patroli rutin, operasi gabungan, serta pengawasan terhadap aktivitas maritim. TNI AL berperan aktif dalam memastikan keamanan pelayaran, mencegah pelanggaran batas wilayah, menanggulangi penyelundupan, serta melindungi sumber daya laut dari eksploitasi ilegal. Keberadaan unsur kapal perang dan patroli laut juga menjadi bentuk kehadiran negara di laut, yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim berdaulat di kawasan Indo-Pasifik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Opskamla secara berkelanjutan di wilayah-wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, dan Laut Arafura berhasil menurunkan angka pelanggaran hukum laut (Arsana, 2020), khususnya aktivitas kapal asing di wilayah ZEE. Namun, efektivitas pelaksanaan operasi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti luasnya cakupan wilayah pengawasan, keterbatasan jumlah kapal patrol (Supriyanto, 2019), serta perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi maritim. Oleh karena itu, penerapan teori keamanan maritim dalam konteks Indonesia harus diiringi dengan penguatan sistem pertahanan laut terpadu, modernisasi teknologi pengawasan, dan sinergitas kelembagaan, agar Opskamla dapat berfungsi optimal dalam menjaga keamanan dan menegakkan kedaulatan negara di laut.

3. Optimalisasi Opskamla dalam menjaga kedaulatan negara di Laut Perbatasan

Pelaksanaan Opskamla oleh TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara di laut perbatasan menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, operasional, dan teknis. Luasnya wilayah laut yurisdiksi Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia menjadi tantangan besar dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Kondisi geografis yang kompleks, seperti banyaknya pulau kecil terluar, cuaca ekstrem, serta dinamika arus dan gelombang laut yang tinggi, sering kali menghambat efektivitas patroli di lapangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, jumlah kapal patroli, pesawat intai maritim, serta sistem radar dan satelit pengawasan menyebabkan masih adanya celah keamanan di beberapa titik perbatasan.

Hambatan lain yang signifikan meliputi kurangnya koordinasi antarinstansi maritim (Busro, 2019), keterbatasan personel terlatih, serta kendala anggaran dan logistik yang memengaruhi keberlanjutan operasi. Belum terwujudnya sistem komando terpadu antara TNI AL, Bakamla, KKP, Polairud, dan instansi terkait lainnya menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan lambatnya respons terhadap pelanggaran di laut. Selain itu, meningkatnya ancaman non-tradisional seperti penyelundupan, perompakan, dan kejahatan lintas negara memperberat tugas Opskamla yang membutuhkan pendekatan lintas sektor. Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan Opskamla sangat bergantung pada peningkatan kapasitas operasional, sinergi kelembagaan, serta dukungan kebijakan dan sumber daya negara dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia di wilayah perbatasan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Opskamla, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan aspek operasional, kelembagaan, dan teknologi maritim. Salah satu langkah utama adalah modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut, termasuk penambahan kapal patroli cepat, kapal perang multifungsi, pesawat intai maritim, serta sistem radar dan satelit pengawasan terintegrasi yang mampu menjangkau

wilayah perbatasan terpencil (Sambhi, 2016).

Sinkronisasi dan integrasi komando antarinstansi maritim seperti TNI AL, Bakamla, KKP, Polairud, dan instansi penegak hukum lainnya melalui pembentukan pusat komando terpadu (*joint maritime command center*) sangat penting untuk diterapkan (Laksmana, 2011), karena berfungsi sebagai wadah koordinasi, pengambilan keputusan cepat, dan distribusi informasi real-time. Langkah ini akan mengurangi tumpang tindih kewenangan serta mempercepat respons terhadap insiden di laut. Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur pangkalan laut di wilayah perbatasan, seperti Natuna, Tarakan, dan Saumlaki, agar dapat mendukung keberlanjutan operasi dengan logistik dan dukungan teknis yang memadai.

Selain itu, peningkatan efektivitas Opskamla memerlukan dukungan kebijakan nasional yang konsisten di bidang pertahanan dan keamanan maritim, termasuk alokasi anggaran yang memadai serta penguatan diplomasi maritim di forum regional dan internasional. Melalui kerja sama keamanan laut dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, dan Australia, Indonesia dapat memperkuat pengawasan perbatasan (Bradford, 2019) dan menekan potensi pelanggaran lintas batas. Dengan demikian, melalui kombinasi antara penguatan kapasitas pertahanan, sinergi antarinstansi, serta dukungan kebijakan strategis, pelaksanaan Opskamla dapat dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia secara berkelanjutan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Opskamla merupakan instrumen strategis TNI Angkatan Laut dalam menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah laut, khususnya di kawasan perbatasan yang memiliki nilai strategis dan tingkat kerawanan tinggi. Melalui kegiatan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum, Opskamla menjadi wujud nyata kehadiran negara di laut yang memperkuat eksistensi dan legitimasi kedaulatan maritim Indonesia.

2. Pelaksanaan Opskamla telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan pelanggaran batas wilayah, penyelundupan, dan kegiatan ilegal lainnya di laut. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan alutsista, luasnya cakupan wilayah pengawasan, kondisi geografis yang kompleks, serta belum optimalnya koordinasi dan sinergi antarinstansi maritim.
3. Optimalisasi pelaksanaan Opskamla memerlukan dukungan kebijakan pertahanan maritim yang komprehensif, meliputi modernisasi alutsista, peningkatan kemampuan personel, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta integrasi komando dan kendali di tingkat operasional. Dengan demikian, keberhasilan Opskamla tidak hanya mencerminkan kekuatan pertahanan laut, tetapi juga menjadi indikator tegaknya kedaulatan dan stabilitas

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kemampuan operasional unsur-unsur laut melalui penambahan kapal patroli cepat, pesawat intai maritim, serta pengembangan sistem radar dan satelit pengawasan terintegrasi guna mendukung pengawasan wilayah perbatasan secara efektif dan berkelanjutan.
2. Peningkatan Profesionalisme Personel. TNI Angkatan Laut perlu terus meningkatkan kompetensi prajurit melalui pendidikan, latihan, dan penugasan operasional berkelanjutan, terutama di bidang pengoperasian sistem pengawasan modern, intelijen maritim, serta penegakan hukum laut.
3. Integrasi Komando dan Sinergitas Antarinstansi. Perlu dibentuk Joint Maritime Command Center sebagai wadah koordinasi terpadu antara TNI AL, Bakamla, dan instansi maritim lain guna mewujudkan komando dan kendali yang efektif dalam pelaksanaan operasi keamanan laut.
4. Penguatan Dukungan Logistik dan Infrastruktur. Pembangunan dan penguatan pangkalan laut di wilayah strategis seperti Natuna, Tarakan, dan Saumlaki perlu diprioritaskan untuk mendukung keberlanjutan operasi serta memperpendek rantai dukungan logistik.

DAFTAR RUJUKAN

- (CIA), C.I.A. (2025) 'The World Factbook: Indonesia'. Available at: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/>.
- Agastia, G.B.D. (2020) 'Peran TNI Angkatan Laut dalam Menegakkan Kedaulatan di Laut Natuna Utara', *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(2), pp. 1–14.
- Andi Arsana, M. (2016) 'Menegaskan Kedaulatan Maritim Indonesia Melalui Batas Maritim', *Jurnal Geografi*, 8(2), pp. 120–132.
- Arsana, M.A. (2020) 'Indonesia's Maritime Sovereignty Challenges in the North Natuna Sea', *The Strategist* [Preprint]. Available at: <https://www.aspistrategist.org.au/>.
- Bakrie, C.R. (2017) 'Tantangan Sinergitas Keamanan Maritim Indonesia di Era Poros Maritim Dunia', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3), pp. 1–16.
- Bodin, J. (1992) *On Sovereignty: Four Chapters from The Six Books of the Commonwealth*. Edited by J.H. Franklin. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bradford, J.F. (2019) 'The Trilateral Maritime Patrol in the Sulu-Celebes Seas: A Review of its Progress, Problems, and Prospects', *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 41(1), pp. 78–99.
- Bueger, C. (2015) 'What is Maritime Security?', *Marine Policy*, 53, pp. 159–164.
- Busro, M. (2019) 'Sinergitas Kelembagaan dalam Penegakan Hukum di Laut Guna Mendukung Keamanan Maritim Indonesia', *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(1), pp. 87–106.
- Courmont, A.A.B. (2017) 'Sovereignty and the Sea: The Importance of a Physical Presence', *Naval War College Review*, 70(3), pp. 11–30.
- Damos Dumoli Agusman, and A.H.O. (2013) 'Indonesia and the Law of the Sea', *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 28(1), pp. 1–32.

- Darmawan, A.R. (2019) 'The South China Sea and the Challenge of Indo-Pacific Maritime Security', *Jurnal Global & Strategis*, 13(2), pp. 119-134.
- Dinarto, D. (2020) 'Making Sense of Indonesia's Naval Modernisation: A Comparative Analysis', *Journal of the Indian Ocean Region*, 16(1), pp. 71-88.
- Indonesia, R. of (2004) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Indonesia: Undang-Undang.
- Laksmana, E.A. (2011) 'Indonesia's Maritime Security: Competing Institutional Interests', *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 33(3), pp. 338-361.
- Mahan, A.T. (1890) *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783*. Boston: Little, Brown and Company.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edited by 3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Sambhi, N. (2016) 'A New Naval Strategy for Indonesia's "Global Maritime Fulcrum"', *Security Challenges*, 12(2), pp. 43-58.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edited by 3. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, R. (2001) 'Ancaman Keamanan Non-Tradisional dan Relevansinya bagi Indonesia BT - Ancaman Keamanan di Asia Tenggara', in M.S. Hikam (ed.). Jakarta: Pustaka Pelajar, pp. 45-67.
- Supriyanto, R.A. (2015) 'Indonesia's Maritime Security: A Test Case for Regional Cooperation BT - Asia-Pacific Regional Security Assessment 2015', in. London: IISS.
- Supriyanto, R.A. (2019) 'Lagging Behind: Indonesia's Naval Modernization', *Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI)* [Preprint]. Available at: <https://amti.csis.org/>.
- Yin, R.K. (2011) *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.